



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**Jln. Perwira No. 33 Belakang Balok Telp. (0752) 626633 Kota**  
**Bukittinggi**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**NOMOR : 188-45/41/OPMPSPKT - 2017 .**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN YANG  
MEMPERSYARATKAN KETENTUAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dalam pengurusan perizinan yang mempersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, perlu adanya standar operasional prosedur yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengurusan Perizinan Yang Mempersyaratkan Ketentuan Penyelesaian Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

Mengingat : 1. Undang -Undang nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 20;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Standar Operasional Prosedur Pengurusan Perizinan yang Mempersyaratkan Ketentuan Penyelesaian Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;      |
| KESATU     |   |   |
| KEDUA      | : | Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini;                                   |
| KETIGA     | : | Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum kedua memuat langkah-langkah yang dilakukan untuk diterbitkannya perizinan; |

- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum kedua merupakan pedoman yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh petugas pelaksana dan masyarakat yang akan mengurus perizinan dimaksud;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 30 Maret 2017

KEPALA,

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN  
DAN TENAGA KERJA

SYAHRIZAL. ST

Nip. 196112121986021002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS****PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU,  
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA  
KERJA****STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
IZIN GANGGUAN****A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No.10 tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.

**B. Peryaratatan Permohonan**

1. Permohonan tertulis;
2. Foto Copy KTP Pemilik;
3. Foto Copy IMB/Kartu Kuning;
4. Surat Perjanjian sewa menyewa atau surat persetujuan dari pemilik tanah/bangunan bilamana tanah/bangunan tersebut bukan milik pemohon/Foto Copy sertifikat tanah;
5. Denah lokasi;
6. Untuk izin yang menimbulkan gangguan diperlukan dokumen Amdal/UPL/UKL/SPPL untuk izin yang berdampak lingkungan dan amdal lalin untuk izin yang memiliki dampak/ gangguan lalu lintas darat;
7. Akta Notaris yang telah disahkan yang berwenang.
8. Pasfoto 3x4

**C. Prosedur**

1. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerjaserta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan;

2. Berkas lengkap dimasukkan melalui loket pendaftaran;
3. Jika persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh surat tanda terima berkas dan selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan;
4. Petugas teknis akan melakukan penelitian lapangan dan hasil penelitian dilaporkan kepada kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam bentuk rekomendasi;
5. Petugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja akan menghubungi pemohon dan menyampaikan tentang diterima atau ditolak;
6. Apabila permohonan tidak diterima,maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja memberitahukan penolakari secara tertulis kepada Pemohon;
7. Apabila diterima maka akan diberikan besaran biaya izin dengan dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk dibayar;
8. Pemohon Membayar retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; dan
9. Permohonan yang diterima diproses;
10. Pemohon menerima SITU HO melalui loket penyerahan setelah menyerahkan bukti pelunasan.

#### D. Waktu Penyelesaian

1. Rekomendasi (setelah cek lapangan) 3 hari  
4hari kerja  
proses izin (retribusi sudah dibayar)  
7 hari izin terbit
2. Tanpa rekomendasi izin dapat diterbitkan dalam 4 hari (retribusi sudah dibayar)

## II Izin Pemakaian Alat Berat Milik Pemerintah Daerah.

### A. Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2012

#### A. Persyaratan Permohonan

1. Permohonan tertulis;
2. Foto Copy KTP pemohon;
3. Foto Copy Surat Perintah Kerja (khusus untuk kontraktor);
4. Surat izin pemakaian alat (dari DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA);
5. Seluruh persyaratan rangkap 2 (dua).

#### B. Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
2. Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas loket pendaftaran;
3. Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan;
4. Petugas Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja akan melakukan koordinasi dengan OPD teknis (DPU);
5. Apabila alat yang dipinjam bisa dipakai maka akan diberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dibuatkan izinnya;
6. Pemohon Membayar retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui kasir/loket bank; Pemohon menerima, Izin Pemakaian Alat Berat dan Barang Inventaris Daerah yang telah selesai di loket penyerahan setelah menyertakan bukti pelunasan.

C. 2 hari kerja pemrosesan izin.



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

## DINAS PENANAMAN MODAL PTSP PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Penwira No. 33 Belakang Batok Telp. (0752) 626633 Bukittinggi

### BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

#### Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No. 5 tahun 2009
- Perda Kota Bukittinggi Nomor tahun 2009
- Perda Kota Bukittinggi No 9 Tahun 2016 Tentang Peribentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSPTK
- Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188/45.05-2017 Tentang Pendeklarasi Kewenangan, Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala DPMPTSPTK

#### Keterkaitan

- SOP Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan
- SOP Pemrosesan Panterimaan Retribusi

#### Peringatan

Jika SOP tidak diaksanakan maka Proses Perizinan Tidak Berjalan Sesuai Dengan Prosedur

#### Kualifikasi pelaksana

- Menguasai Peraturan di Bidang Perizinan
- Menguasai Prinsip Pelayanan Prima

#### Peralatan/pelengkapan

- Blanko/Formular Permohonan
- Komputer dan Printer
- Alat Tulis Kantor
- Kendaraan Operasional
- Alat Ukur
- Camera digital

#### Pendaftaran dan Pencatatan

- Registrasi Permohonan
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
- Rekomendasi Dari Tim Teknis

#### Mutu Baku

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
		Front Office	Pemohon	Kasubbid Pel Adm Perizinan	Kabid Pel Perizinan	Staf	Tim Teknis	Sekretaris	Kepala Badan	Staf Data	
1	Front Office memberikan informasi tentang prosedur dan persyaratan pengurusan izin dan menyerahkan blanko Permohonan Izin kepada pemohon sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon								Blanko Permohonan Perizinan	15 menit	Blanko Permohonan Perizinan diterima Pemohon
2	Pemohon mengisi blanko permohonan izin dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, kemudian menyerahkan kembali permohonan izin kepada Front Office.								Blanko Permohonan Perizinan	-	Blanko Permohonan Perizinan yang telah diisi
3	Front Office memeriksa berkas permohonan tidak penuh, kalau belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon, jika sudah lengkap Front Office membuatkan Tanda Terima berkas permohonan.								Blanko Permohonan Perizinan + Persyaratan Izin	30 menit	Blanko Permohonan Perizinan yang telah diisi + Persyaratan Izin
4	Front Office membuatkan Tanda Terima berkas permohonan dan menyerahkan berkas kepada Kasubbid Pel Adm Perizinan untuk diperiksa.								Blanko Permohonan Perizinan yang telah diisi + Persyaratan Izin	15 menit	Tanda Terima Berkas
5	Kasubbid Pel Adm Perizinan membubarkan paraf pada kartu kendali bahwa persyaratan administrasi sudah lengkap dan mohon proses selanjutnya kepada Kabid Pelayanan Perizinan.								Blanko Permohonan Perizinan + Persyaratan Izin	30 menit	Berkas Permohonan + Kartu Kendali

#### Kualifikasi pelaksana

- Menguasai Peraturan di Bidang Perizinan
- Menguasai Prinsip Pelayanan Prima

#### Peralatan/pelengkapan

- Blanko/Formular Permohonan
- Komputer dan Printer
- Alat Tulis Kantor
- Kendaraan Operasional
- Alat Ukur
- Camera digital

#### Pendaftaran dan Pencatatan

- Registrasi Permohonan
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
- Rekomendasi Dari Tim Teknis

#### Mutu Baku

1. Menguasai Peraturan di Bidang Perizinan	2. Menguasai Prinsip Pelayanan Prima
--	--------------------------------------

#### Nama SOP

Pemrosesan Surat Izin Gangguan

#### Nomor SOP

NIP. 196112121986021002

SYAHRIZAL,S.T

Pembina Tk.I

Kepala Dinas Penanaman Modal Relayanan Perizinan  
Kepada, Perindustrian Tehaga Kerja

f.

Nomor SOP 02/DPMPTSPPTK/2017

Tanggal Pembuatan

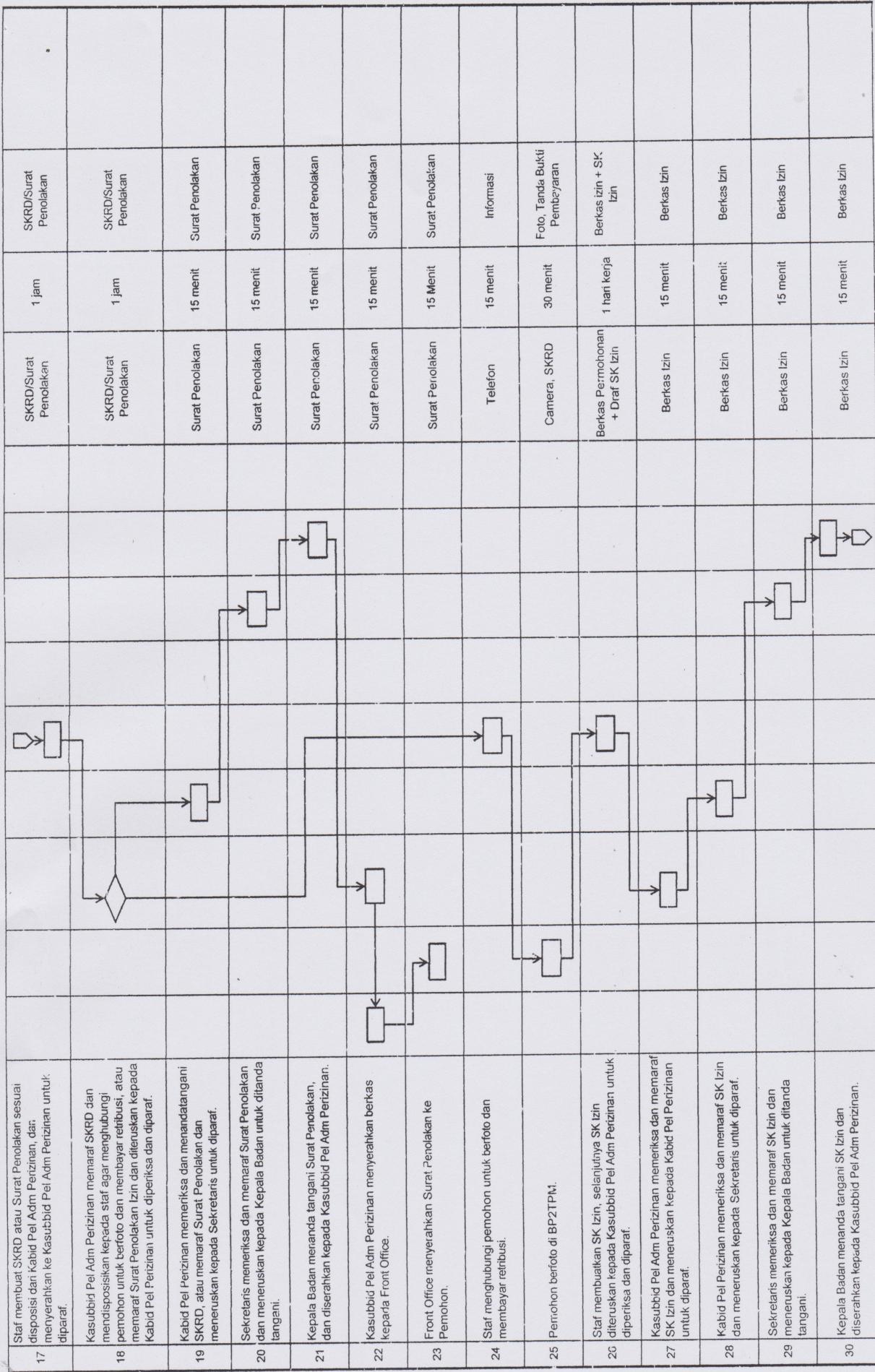
MARET 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

			Berkas Permohonan + Kartu Kendali	15 menit	Berkas Permohonan + Kartu Kendali
6	Kabid Pelayanan Perizinan mendisposisikan permohonan izin ke Kasubbid Pel Adm Perizinan untuk diproses.		Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan
7	Kasubbid Pel Adm Perizinan menerima berkas permohonan yang telah disetujui oleh Kabid untuk diproses.		Berkas Permohonan	30 menit	Berkas Permohonan
8	Kasubbid Pel Adm Perizinan mendisposisikan ke staf untuk membuat Surat Tugas, Lampiran Surat Tugas, Daftar Hadir, Blanko Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAP) dan Surat Permintaan Bantuan Tenaga kepada SKPD terkait (Tim Teknis).		Surat Tugas, Lampiran Surat Tugas, Daftar Hadir, Blanko BAP, Blanko Rekomendasi dan Surat Permintaan Bantuan Tenaga	1 jam	Surat Tugas, Lampiran Surat Tugas, Daftar Hadir, Blanko BAP, Blanko Rekomendasi dan Surat Permintaan Bantuan Tenaga
9	Staf menyiapkan Surat Tugas, Lampiran Surat Tugas, Daftar Hadir, Blanko Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAP) dan Surat Permintaan Bantuan Tenaga kepada SKPD terkait (Tim Teknis).		Surat Permintaan Tenaga	15 menit	Surat Permintaan Tenaga
10	Kasubbid Pel Adm Perizinan memerlukan Surat Permintaan Bantuan Tenaga dan diteruskan kepada Kabid Pel Perizinan untuk ditandai tangani.		Surat Permintaan Tenaga	15 menit	Surat Permintaan Tenaga
11	Kabid Pel Perizinan mendatangkan Surat Permintaan Bantuan Tenaga, dan diserahkan kepada Kasubbid Pel Adm Perizinan.		Surat Permintaan Tenaga	15 menit	Surat Permintaan Tenaga
12	Kasubbid Pel Adm Perizinan mendisposisikan ke staf untuk mendistribusikan Surat Permintaan Tenaga ke Tim Teknis (SKPD terkait).		Surat Permintaan Tenaga	2 hari kerja	Surat Permintaan Tenaga
13	Staf mendistribusikan Surat Permintaan Tenaga kepada Tim Teknis (SKPD terkait).		Surat Tugas, Lampiran Surat Tugas, Daftar Hadir, Blanko BAP, Blanko Rekomendasi.	5 hari kerja	Surat Tugas, Lampiran Surat Tugas, Daftar Hadir, Blanko BAP, Blanko Rekomendasi.
14	Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan: sesuai jadwal yang telah ditentukan dan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAP) yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim Teknis dan Kabid Pel Perizinan sebagai Koordinator.		Rekomendasi	1 hari kerja	Rekomendasi
15	Tim Teknis memberikan Surat Rekomendasi kepada Kabid Pel Perizinan apakah permohonan izin diterima/ditolak.		Berkas Permohonan + rekomendasi	1 jam	Berkas Permohonan + rekomendasi
16	Kabid Pel Perizinan memutuskan Permohonan jika diterima Kabid Pel Perizinan menetapkan Retribusi dan mendisposisikan ke staf untuk dibuatkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan menghubungi pemohon untuk berfoto dan membayar retribusi. Jika ditolak Kabid Pel Perizinan mendisposisikan kepada staf untuk membuat surat perintah.				



31	Kasubbid Pel Adm Perizinan menyerahkan berkas kepada Front Office.			Berkas Izin	15 menit	Derkas Izin
32	Front Office menerima berkas izin.			SK Izin	15 Menit	SK Izin
33	Front Office menyerahkan SK Izin ke Pemohon dan mengisi Buku Agenda SK Izin.			SK Izin + Buku Agenda SK Izin	15 Menit	SK Izin + Buku Agenda SK Izin
34	Front Office menyerahkan lampiran kepada Staf Bidang Program Data dan Pengembangan.		↓	Lampiran SK Izin	10 Menit	Arsip SK Izin



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

## DINAS PENANAMAN MODAL PTSP, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Telp. (0752) 626633 Bukittinggi

### BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

#### Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2. Perda Kota Bukittinggi No. 9 tahun 2012
4. Perda Bukittinggi No 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP-TK.
5. Keputusan Walikota Nomor 188/45-05-2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Pengelolaan dan Penandaianganan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP-TK

#### Keterkaitan

1. SOP Dokumentasi dan Pelaporan Perizinan
2. SOP Pemrosesan Penerimaan Retribusi

#### Peringatan

Apabila SOP tidak diaksanakan maka Proses Perizinan Tidak Berjalan Sesuai Dengan Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan	
		Front Office	Pemohon	Kasubbid Pel Adm Perizinan	Kabid Pel Perizinan	Staf	Sekretaris		
1	Front Office memberikan informasi tentang prosedur dan persyaratan pengurusan izin dan menyerahkan blanko Permohonan Izin kepada pemohon: sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon	Front Office	Pemohon					Blanko Permohonan Perizinan	15 menit
2	Pemohon mengisi blanko permohonan izin dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, kemudian menyerahkan kembali permohonan izin kepada Front Office.							Blanko Permohonan Perizinan	-
3	Front Office memeriksa berkas permohonan TIDAK pemohon, kalau belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon, jika sudah lengkap Front Office membuatkan Tanda Terima berkas permohonan.							Blanko Permohonan Perizinan + Persyaratan Izin	30 menit
4	Front Office membuatkan Tanda Terima berkas kepada Kasubbid Pel Adm Perizinan untuk diperiksa.							Blanko Permohonan Perizinan + Persyaratan Izin	15 menit
5	Kasubbid Pel Adm Perizinan membuatkan paraf pada kartu kendai bahwa persyaratan administrasi sudah lengkap dan mohon proses selanjutnya kepada Kabid Pelayanan Perizinan.							Blanko Permohonan Perizinan + Persyaratan Izin	30 menit

6	Kaibid Pelayanan permohonan izin ke Kasubbid Pel Adm Perizinan untuk diproses.						Berkas Perizinan + Kartu Kendali	15 menit	Berkas Perizinan + Kartu Kendali
7	Kasubbid Pel Adm Perizinan menerima berkas permohonan yang telah disetujui oleh Kabid untuk diproses.						Berkas Permohonan	10 Menit	Berkas Permohonan
8	Kasubbid Pel Adm Perizinan menetapkan biaya dan mendisposisikan ke staf untuk membuatkan SKRD dan Surat Perjanjian Peminjaman.						Berkas Permohonan	30 menit	Berkas Permohonan + Surat Permintaan Rekomendasi
9	Staf membuatkan SKRD dan Surat Perjanjian Peminjaman selanjutnya diturunkan ke Kasubbid Pel Adm Perizinan untuk diperiksa dan diparaf.						Berkas Permohonan	30 menit	Berkas Permohonan + Surat Permintaan Rekomendasi
10	Kasubbid Pel Adm Perizinan memeriksa SKRD dan Surat Perjanjian Peminjaman dan diteruskan kepada Kabid Pel Perizinan untuk ditanda tangani.						Berkas Permohonan + Surat Permintaan Rekomendasi	15 menit	Berkas Permohonan + Surat Permintaan Rekomendasi
11	Kabid Pel Perizinan mendatangkan SKRD, dan menurunkan Surat Perjanjian Peminjaman kepada Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf.						Berkas Permohonan + Surat Permintaan Rekomendasi	15 menit	Berkas Permohonan + Surat Permintaan Rekomendasi
12	Sekretaris memeriksa dan memeriksa Surat Perjanjian Peminjaman dan meneruskannya kepada Kepala Badan untuk ditanda tangani.						Berkas Permohonan + SK Izin	15 menit	Berkas Permohonan + SK Izin
13	Kepala Badan menandatangani Surat Perjanjian Peminjaman, dan diserahkan kepada Kasubbid Pel Adm Perizinan.						Berkas Permohonan + SK Izin	15 menit	Berkas Permohonan + SK Izin
14	Kasubbid Pel Adm Perizinan mendisposisikan ke staf untuk menghubungi pemohon agar membayar retribusi.						SKRD dan Surat Perjanjian	15 menit	SKRD dan Surat Perjanjian
15	Staf untuk menghubungi pemohon dan menyertakan SKRD kepada pemohon untuk membayar retribusi.						SKRD dan Surat Perjanjian	30 menit	SKRD dan Surat Perjanjian
16	Pemohon membayar retribusi sesuai besaran SKRD ke kasir dan menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran ke staf.						SKRD		Tanda Bukti Pembayaran
17	Kasubbid Pel Adm Perizinan menyerahkan berkas kepada Front Office.						Surat Perjanjian dan Tanda Bukti Pembayaran	15 menit	Surat Perjanjian dan Tanda Bukti Pembayaran
18	Front Office menerima berkas izin.						Surat Perjanjian dan Tanda Bukti Pembayaran	15 Menit	Surat Perjanjian dan Tanda Bukti Pembayaran
19	Front Office menyerahkan SK Izin ke Pemohon dan mengisi Buku Agenda SK Izin.						Surat Perjanjian dan Tanda Bukti Pembayaran	15 Menit	Surat Perjanjian dan Tanda Bukti Pembayaran
20	Front Office menyerahkan lampiran kepada Staf Bidang Program Data dan Pengembangan.						Lampiran Surat Perjanjian	10 Menit	Arsip Surat Perjanjian